



Keinginan Papua untuk Memisahkan Diri dari Indonesia Kaitannya dengan Kemanusiaan

Salwia^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Bauau, Indonesia

¹ opposalwia@gmail.com *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 19 Juni 2021;

Revised: 15 Juli 2021;

Accepted: 28 Juli 2021.

Kata-kata kunci:

Kemanusiaan;

Papua.

Keywords:

Humanity;

Papua.

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji alasan Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia. yang dibahas dengan pemikiran Paul Feyerabend. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Hasil penelitian ini yaitu bahwa sejak Papua menjadi bagian dari NKRI, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih marginal dan miskin. Ketidakpuasan secara ekonomis itu menjadi faktor kemunculannya semangat Papua untuk memerdekakan diri. Pemerintah Pusat dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan di Papua, dan diadakannya Operasi Militer oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mengatasi pemberontakan separatisme. Sudut pandang Paul Feyerabend menentang otoritas dan organisasi hierarkis dalam melakukan hubungan dalam menjaga taraf kemanusiaan. Banyak faktor yang membuat Papua tidak bebas untuk melakukan sesuatu dan serta ada tekanan karena perlakuan diskriminasi yang ditimbulkan dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

ABSTRACT

Papua's Desire to Separate From Indonesia with Humanity. The purpose of the study is to examine the reasons Papua wants to secede from Indonesia. It is discussed with the thought of Paul Feyerabend. This research method uses qualitative methods with a case study approach. Case studies are simply defined as the process of investigation or examination in depth, detail, and detail on a particular or special event that occurs. The result of this study is that since Papua became part of NKRI, some Papuans feel less satisfied because in fact they are still marginal and poor. Economic dissatisfaction was a factor in the emergence of the Spirit of Papua to self-destruct. The Central Government has failed to build prosperity in Papua, and the central government's military operation aims to tackle separatism. Paul Feyerabend's point of view opposes hierarchical authority and organization in making humanity. Many factors make Papua not free to do something and and there is pressure because of the discrimination caused by the Indonesian people themselves.

Copyright © 2021 (Salwia). All Right Reserved

How to Cite : Salwia. (2021). Keinginan Papua untuk Memisahkan Diri dari Indonesia Kaitannya dengan Kemanusiaan. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 1(2), 45–51. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/rhizome/article/view/458>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Papua masuk ke dalam NKRI pada tanggal 19 November 1969 melalui resolusi PBB No. 2504 (Suropati, 2019). Hal ini menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Lalu, Papua menjadi daerah otonom yang sah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui UU No. 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. Sejak Papua menjadi bagian dari NKRI, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih marginal dan miskin. Papua yang memiliki luas empat kali lipat dari pulau Jawa dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar seharusnya mampu untuk membuat rakyatnya dapat hidup sejahtera. Kondisi kemiskinan tersebut tampak dari terisolirnya kehidupan sekitar 74% penduduk Papua. Dari tempat tinggal mereka tidak memiliki akses sarana transportasi ke pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan, serta pelayanan sosial (Pranowo, & Hakim, 2017).

Ketidakpuasan secara ekonomis itu menjadi faktor kemunculannya semangat Papua untuk memerdekakan diri. Pemerintah Pusat dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan di Papua, dan diadakannya Operasi Militer oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mengatasi pemberontakan separatisme di Papua malah mengakibatkan banyak timbulnya pelanggaran HAM. Lalu, tindakan rasisme dan diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat Papua menurut tokoh masyarakat Papua yaitu Benny Glay sudah sejak tahun 60an rasisme dan diskriminasi ini terjadi di masyarakat Papua. Saat itu peralihan Papua dari Belanda ke Indonesia. Bahkan sikap itu diwujudkan dalam sikap negara pada orang asli Papua untuk menimbulkan nasionalisme Indonesia pada orang asli Papua saat itu. Gay mengibaratkan bahwa perlakuan Indonesia merupakan nada dasar untuk membangun Papua. sejarah dan budaya orang asli Papua dimusnahkan terlebih dulu untuk membangun opini bahwa bangsa Papua tidak memiliki sejarah, primitive, tinggal di atas pohon, sehingga harus diturunkan agar sejajar dengan suku-suku lain di Indonesia. Kemudian setelahnya Indonesia bisa membangun nasionalisme Indonesia di Papua.

Kemunculan Organisasi Papua Merdeka atas keresahan yang ada. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan untuk membantu dan melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, sebelumnya bernama Irian Jaya, memisahkan diri dari Indonesia, dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Menurut tokoh Papua Nicoolas Jouwe, Organisasi Papua Merdeka dibentuk ada 1965 pada saat pecahnya peristiwa Gerakan 30 September, oleh para serdadu Belanda di Papua dengan tujuan untuk memusuhi Republik Indonesia dan mengganggu keamanan di wilayah paling timur dan paling baru negara Indonesia.

Organisasi ini sempat mendapatkan dana dari pemerintah Libya yang dipimpin oleh Muammar Gaddafi dan pelatihan dari grup gerilya New People's Army beraliran Maois yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat. Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia. Perjuangan dalam meraih kemerdekaan di tingkat provinsi dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara. Sejak berdiri, OPM berusaha untuk mengadakan dialog diplomatik, mengibarkan Bintang Kejora, dan melancarkan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Para pendukung dari OPM ini juga sering membawa bendera Bintang Kejora dan simbol persatuan Papua lainnya, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang nasional. Lambang nasional itu diadopsi sejak tahun 1961 sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan pada bulai Mei 1963 seusai dengan Perjanjian New York.

Rumusan masalah penelitian ini memuat dua pertanyaan, pertama, mengapa Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia? Kedua, apakah keterkaitan antara konflik papua dengan sudut pandang yang dimiliki oleh Paul Feyerabend? Tujuan penelitian yaitu, pertama, untuk dapat memahami alasan

mengapa Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kedua, Menambah wawasan tentang studi kasus yang dibahas dengan pemikiran Paul Feyerabend.

Penelitian ini terdapat dua penggolongan dalam jurnalnya yang berdasarkan dua tema yang sudah diterapkan yaitu: jurnal tentang pemikiran dari Paul Feyerabend mengenai *anarkhisme epistemology* dan tentang konflik papua merdeka. Perbedaan dan kebaruan yang ditawarkan oleh makalah ini fokus kepada masalah konflik papua merdeka yang dikaitkan dengan pemikiran Paul Feyerabend dengan menggunakan perspektif pemikiran.

Hipotesis penelitian yaitu terdapat keterkaitan tentang kasus yang akan dibahas dengan pemikiran dari Paul Feyerabend tentang *anarkhisme epistemology* bagaimana penyelesaian masalah yang efektif dengan solusi atau pemikiran yang di berikan oleh Paul Feyerabend. Hal ini ini digunakan sebagai landasan agar konflik dari papua merdeka dapat selesai dan tidak terjadi kesalahpahaman.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi (Nurdin, & Hartati, 2019). Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Penelitian studi kasus pandemi di era new normal, dalam konteks ini, menggunakan jurnal atau literatur yang berkaitan pada fokus serta kasus penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan melakukan pembacaan deskriptif, dan melakukan penafsiran.

Hasil dan Pembahasan

Papua ingin merdeka sendiri dikarenakan adanya faktor rasisme yang tidak bisa dilepaskan, maka dari itu ada warga Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia. Menurut laporan Pengelolaan Konflik di Indonesia (2011) yang dibuat Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre), organisasi mediasi independen yang berbasis di Swiss, wacana “Papua Merdeka” sudah muncul dari berpuluh-puluh tahun lalu. Dalam laporan HD Centre rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia sejak tahun 1960-an, termotivasi dari serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik. HD Centre juga menjelaskan bahwa sampai tahun 1960 Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Kemudian tahun 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Tiga Komando Rakyat (TriKora) untuk “memerdekakan” Papua dan menjadikannya bagian dari Indonesia. Komando Soekarno itu tidak sepenuhnya disambut baik. Warga di beberapa daerah Papua seperti Kaimana dan Fakfak memang setuju untuk bergabung ke dalam Indonesia. Namun, di berbagai daerah lainnya kebanyakan dari warga Papua menolak tawaran itu.

Sejak “dipaksa: menjadi bagian Indonesia tahun 1962 hingga sekarang, kelompok warga Papua yang ingin merdeka terus eksis dan terus berkonflik dengan pemerintah. Menurut riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang dikutip dalam laporan HD Centre, akar penyebab konflik ini adalah: pertama, marginalisasi orang asli Papua, terutama dalam hal ekonomi, sebagai efek kebijakan transmigrasi. Kedua, kegagalan program pembangunan di Papua. Ketiga, perbedaan pemahaman sejarah antara warga Jakarta dengan Papua. Keempat, warisan kekerasan yang dilakukan negara terhadap masyarakat Papua. Penilaian LIPI itu senada dengan penilaian Otto Ondawame, selaku tokoh gerakan Papua Merdeka (Yusuf, 2021; Pamungkas, & Rusdiarti, 2017).

Papua melakukan gerakan seperatisme yang dipelopori oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disusul pembentukan Presidium Dewan Papua (PDP). Gerakan ini telah ada sejak tahun 1965 dengan melakukan aktifitas secara sporadis di dalam gerakan militer yang melibatkan masyarakat. Perlawanan yang dilakukan oleh OPM ditandai dengan penyanderaan, demonstrasi massa, pengibaran bendera, penempelan pamflet, serta aksi pengrusakan dan pelanggaran lintas batas negara. Kondisi sosial dan politik yang tidak kondusif di dalam lingkungan Papua membuat beberapa warga Papua

keluar meninggalkan negaranya, ini merupakan alasan utama 42 warga Papua meminta suaka politik ke pemerintahan Australia pada tahun 2006. Mereka keluar dari Papua menggunakan perahu dan memanfaatkan kelemahan selama lima hari dan akhirnya mendarat di tepi pantai terpencil Cape York, Australia. Lalu, pada bulan Maret 2006, Departemen Imigrasi dan Masalah-masalah penduduk asli Australia (DIMIA) memberikan visa tinggal sementara kepada 42 dan 43 warga Papua yang mencari suaka. Dengan itu, keputusan Australia di atas sangat melecehkan Papua dalam integrasi NKRI.

Menurut laporan HD Centre yang diungkapkan oleh Otto Ondawame selaku anggota OPM selama bertahun-tahun tentara Indonesia melakukan kebijakan keamanan ketat di daerah ini yang melibatkan tercatatnya pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, termasuk tuduhan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, intimidasi, pemenjaraan, kekerasan seksual dan perkosaan. Pemerintah Indonesia juga telah mempromosikan dengan aktif, dan membiarkan dengan pasif, diskriminasi yang meluas terhadap orang asli dan arus migrasi, yang saat ini mengakibatkan berkurangnya jumlah populasi orang Papua menjadi hampir minoritas di tanahnya sendiri (Toussaint, & Millet, 2019).

Selain pelanggaran hak sipil dan politik, Otto Ondawame selaku anggota dari OPM juga menilai bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar hak ekonomi mayoritas warga Papua selama puluhan tahun, seperti: pertama, pengeksploitasian sumber daya alam yang hanya menguntungkan sedikit orang, dan membiarkan pemilik asli tanah dalam kemiskinan. Kedua, distribusi yang tidak adil atas pelayanan sosial dan kesempatan ekonomi antara Papua dan non-Papua. Persoalan-persoalan itu belum selesai atau tuntas hingga sekarang. Di tahun 2019 Papua masih tergolong sebagai provinsi termiskin di Indonesia dan banyak tertinggal dalam berbagai hal, dari pendidikan sampai kesehatan. Dengan begitu, tidak heran jika Papua ingin merdeka sendiri dikarenakan banyak konflik yang terjadi dengan menyudutkan warga Papua (Alam, 2020).

Sudut Pandang Paul Feyerabend. Pemikiran Feyerabend tentang anarkisme ilmu pengetahuan dilatar belakangi oleh dominasi paradigma pemikiran positivistic yang dimulai pada abad ke-19. August Comte sebagai pencetus dari paradigma positivisme tersebut terpengaruh Descartes yang menyatakan ilmu yang mendasari segala macam ilmu adalah matematika-astronomika-kimia-fisika-biologi dan puncaknya adalah sosiologi. Comte menyatakan bahwa akan mendapatkan penemuan yang bermanfaat. Ilmu-ilmu pengetahuan non-alam akan kesulitan mendapatkan legitimasi karena akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu berkaitan dengan tafsiran-tafsiran yang tidak eksak, sehingga kurang memberikan kemanfaatan bagi manusia modern. Pada masa Feyerabend masyarakat yang positivis menempatkan ilmu pengetahuan dengan metode mereka sama dengan agama bahkan di atasnya (Widarda, 2019).

Dalam lingkungan masyarakat tertentu pada waktu itu, seseorang boleh memilih agama apa saja tapi tidak bisa memilih mempelajari ilmu pengetahuan atau tidak. Ilmu pengetahuan tidak lagi berfungsi untuk membebaskan manusia, tetapi justru untuk menguasai dan memperbudak manusia. Kedudukan ilmu pengetahuan seolah agama di abad pertengahan dengan hegemoni pemikiran positivis. Maka, Feyerabend sangat menekankan pada kebebasan individu sebagaimana diperjuangkan oleh John Stewart Mill dalam karyanya *On Liberty*. Dia melihat kemajuan ilmu pengetahuan dalam pengembangan kebebasan manusia dan terbebasnya ilmu pengetahuan dari hegemoni para positivis.

Pemikiran Anarkisme menurut Paul Feyerabend didefinisikan sebagai pemikiran politik yang memegang negara tidak diinginkan, tidak perlu, dan berbahaya, atau alternatif untuk menentang otoritas dan organisasi hierarkis dalam melakukan hubungan dengan manusia. Para pendukung anarkisme, yang dikenal sebagai “anarkis”, advokat masyarakat bernegara berdasarkan non-hierarkis asosiasi sukarela. Yang dimaksud Paul Feyerabend adalah anarkisme epistemologis. Anarkisme Epistemologis dipertentangkan dengan anarkisme politis atau religius. Dikatakan bahwa bentuk kemampuan (kekuasaan Negara, institusi-institusi, dan ideologi-ideologi yang menopangnya). Anarkisme epistemologis tidak selalu punya loyalitas ataupun permusuhan terhadap institusi-institusi itu. Pada

awalnya, sebagai murid Popper, Feyerabend mendukung filosofi dan prinsip falsifikasi Popper namun kemudian Feyerabend menjadi salah satu penentang prinsip Popper. Feyerabend berpendapat bahwa prinsip falsifikasi Popper tidak dapat dijalankan sebagai satu-satunya metode ilmiah untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Prinsip dasar mengenai tidak adanya metodologi apa pun, misal metodologi empiris atau Rasionalisme Kritis Popper akan memperlambat atau menghalangi pertumbuhan ilmu pengetahuan (Shofiyyuddin, 2015).

Prinsip dasar mengenai tidak adanya metodologi yang berguna dan tanpa kecuali yang mengatur kemajuan sains disebut olehnya sebagai epistemologi anarkis. Penerapan satu metodologi apa pun, misal metodologi empiris atau Rasionalisme Kritis Popper akan memperlambat atau menghalangi pertumbuhan ilmu pengetahuan. Feyerabend mengatakan bahwa ‘anything goes’ yang berarti hipotesa apa pun boleh dipergunakan, bahkan yang tidak dapat diterima secara rasional atau berbeda dengan teori yang berlalu atau hasil eksperimen. Sehingga ilmu pengetahuan bisa maju tidak hanya dengan roses induktif sebagaimana halnya sains normal, melainkan juga secara kontrainduktif. Metode anarkis Feyerabend yang memersoalkan metodologi ilmu pengetahuan secara mendasar ingin menghidupkan kembali ilmu pengetahuan secara mendasar ingin menghidupkan kembali ilmu pengetahuan sebagai ekspresi kebebasan manusia. Feyerabend mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun atas metodologi yang kaku, tetapi harus ada ruang bagi inisiatif ilmuwan. Karena, selain kebenaran, kebebasan ilmiah harus merupakan norma ilmu pengetahuan. Sedangkan kontrol ilmu yang terlalu ketat akan mematikan kreativitas ilmuwan. Semua yang dibuat ditikakan sehingga pada akhirnya orang takut akan kesalahan (Irianto, 2012).

Adanya metode anarkis Feyerabend yang bersemboyan “anything goes”, perkembangan ilmu pengetahuan akan terus meningkat (Nurwahyudi, 2018). Sering dengan tujuan dari Feyerabend yang berusaha untuk memajukan ilmu pengetahuan, metode anarkis ini juga menimbulkan pro dan kontra. Layaknya pisau bermata dua, metode anarkis juga memiliki efek negatif yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia. Sebagai contoh, efek dari dijatuhkannya bom atom yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk menyerang Hiroshima dan Nagasaki masih dirasakan oleh penduduk didaerah tersebut hingga saat ini. Contoh lainnya, adalah penelitian-penelitian ilmuwan yang berhubungan dengan senjata nuklir, biologi, dan kimia menjadi senjata pemusnah massal (mass destruction weapon) tentunya juga dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia di masa mendatang. Dengan demikian, ada dua manfaat dari munculnya metode anarkis Feyerabend, yaitu ilmu pengetahuan akan tetap berkembang dan penggunaan ilmu pengetahuan itu sendiri yang sulit dikontrol oleh manusia.

Pokok Masalah dan keterkaitannya dengan sudut pandang Paul Feyerabend. Dari sudut pandang Paul Feyerabend tentang pemikiran anarkisme yang menentang otoritas dan organisasi hierarkis dalam melakukan hubungan dengan manusia. Ada keterkaitannya dengan konflik yang berada di Papua. Papua ingin merdeka sendiri dan memisahkan diri dari negara Indonesia dikarenakan banyak faktor yang membuat Papua tidak bebas untuk melakukan sesuatu dan serta ada tekanan karena perlakuan diskriminasi yang ditimbulkan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, dari banyak faktor itu dan lainnya membuat Papua ingin memisahkan diri serta merdeka sejak lama.

Paul Feyerabend juga berpendapat bahwa harus memiliki “Sikap Kemanusiawian” yang mana menurut sikap ini manusia dapat bebas dan memiliki kebebasan kurang lebih seperti di dalam pengertian John Stewart Mill yang membelanya dalam esai “On Liberty” Paul Feyerabend menyetujui hal tentang usaha yang meningkatkan kebebasan, untuk menuju ke kehidupan yang penuh dan produktif. Ia mendukung John Stewart Mill dalam membela pembinaan individualitas yang secara pribadi memproduksi, atau dapat memproduksi manusia-manusia yang maju. Dari pernyataan yang dimiliki oleh Paul Feyerabend sangat berkaitan dengan keinginan Papua yaitu memisahkan diri serta dapat bebas berekspresi sebagai manusia. Tidak hanya dibatasi dan dimanfaatkan saja keunggulan yang dimiliki di Papua seperti sumber daya alamnya yang banyak dimanfaatkan oleh warga Indonesia nya sendiri

maupun warga asing. Paul Feyerabend juga menolak perlakuan otoritas dan organisasi hierarkis yang mana saat ini banyak sekali perlakuan yang didapatkan oleh warga Papua berupa perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak mendapat keadilan. Maka dari itu, pemikiran dari Paul Feyerabend berkaitan dengan konflik yang Papua miliki.

Simpulan

Simpulan penelitian ini yaitu bahwa sejak Papua menjadi bagian dari NKRI, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih marginal dan miskin. Ketidakpuasan secara ekonomis itu menjadi faktor kemunculannya semangat Papua untuk memerdekakan diri. Pemerintah Pusat dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan di Papua, dan di adakannya Operasi Militer oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mengatasi pemberontakan separatisme di Papua malah mengakibatkan banyak timbulnya pelanggaran HAM. Lalu, tindakan rasisme dan diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Maka dari itu munculah Organisasi Papua Merdeka atas keresahan yang ada. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan untuk membantu dan melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, sebelumnya bernama Irian Jaya, memisahkan diri dari Indonesia, dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Dari sudut pandang Paul Feyerabend tentang pemikiran anarkisme yang menentang otoritas dan organisasi hierarkis dalam melakukan hubungan dengan manusia. Ada keterkaitannya dengan konflik yang berada di Papua. Papua ingin merdeka sendiri dan memisahkan diri dari negara Indonesia dikarenakan banyak faktor yang membuat Papua tidak bebas untuk melakukan sesuatu dan serta ada tekanan karena perlakuan diskriminasi yang ditimbulkan dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

Referensi

- Ahdiat, A. (2019). Kenapa Orang Papua Ingin Merdeka? retrieved from: https://kbr.id/nasional/08-2019/kenapa_orang_papua_ingin_merdeka_/100254.html
- Alam, S. (2020). Jurnalisme Damai Dalam Pembingkai Berita Rasisme Mahasiswa Papua di Tribunnews.com dan Detik.com. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(2), 121-136.
- Faradi, Abdul Aziz. 2012. (Tesis) *Epistemologi Anarkhis Paul Feyerabend dan Implikasinya bagi Pemikiran Islam*. Yogyakarta.
- Irianto, S. (Ed.). (2012). *Otonomi perguruan tinggi: suatu keniscayaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nuridin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Nurwahyudi, A. (2018). Epistemologi Anarkisme Penyiaran Islam Dalam Perspektif Paul K. Feyerabend. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 1(2), 87-102.
- Pamungkas, C., & Rusdiarti, S. R. (Eds.). (2017). *Updating Papua road map: proses perdamaian, politik kaum muda, dan diaspora Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pranowo, P., & Hakim, F. N. (2017). Retrospeksi Model Pengembangan Manusia di Daerah Pedalaman Pegunungan dan Perbatasan Papua - Papua Nugini. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 93-106.
- Santoso, Listiyono. 2006. *Seri Pemikiran Tokoh: Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Shofiyyuddin, M. (2015). Anarki Epistemologis Paul Karl Feyerabend dan Relevansinya Pada Epistemologi Tafsir Al-Quran. dalam *Hermeneutika*, 9(1).
- Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 7(1), 73-89.
- Toussaint, E., & Millet, D. (2019). *Mafia Bank Dunia: Alat Penjajahan Baru Negara Industri Terhadap Negara Berkembang Sejak Akhir Perang Dunia II*.

- Widadio, N. A., Latief, M. N. (2019). Artikel Riwayat Konflik Papua, Tanah Kaya di Ujung Timur Indonesia. Oleh . <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/riwayat-konflik-papua-tanah-kaya-di-ujung-timur-indonesia/1635906>
- Widarda, D. (2019). Demokrasi Sosial dalam Pemikiran Paul Feyerabend. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(2), 184-203.
- Yusuf, M. A. (2021). Perubahan Arah Dukungan Fiji Pada Upaya West Papuan National Coalition For Liberation (Wpncl) Untuk Menjadi Anggota Melanesian Spearhead Group (Msg) Tahun 2013-2014 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).